Vaksinasi Terus Berjalan

BANTUL (KR) - Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dijadikan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dan melindungi masyarakat dari penularan vurus tersebut. Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih menegaskan vaksinasi Covid-19 juga bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, sehingga Pemkab Bantul melaksanakan vaksinasi bagi pihak-pihak yang rentan terpapar Covid-19.

"Hari ini ada tiga kapanewon yang melaksanakan vaksinasi bagi rekan-rekan FPRB dan pamong, yakni di Kapanewon Srandakan, Pajangan dan Bantul," jelas Bupati saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Pajangan, Sabtu (27/3).

Lebih lanjut dikemukakan, pelaksanaan vaksinasi di Bantul dilaksanakan secara bertahap kepada 1.449 orang relawan FPRB. Karena anggota FPRB juga termasuk salah satu garda terdepan dalam penanganan Covid-19 atau pihak-pihak yang rentan terhadap paparan Covid-19.

Menurut Halim, pemerintah akan memvaksin seluruh penduduk yang layak divaksin dengan cara bertahap, karena pengiriman vaksin dari pemerintah pusat juga dilakukan secara bertahap.

Warga di Bantul yang potensi untuk divaksin sekitar 600.000 atau sekitar 60 persen dari jumlah penduduk. Sementara sampai saat ini yang sudah menjalani vaksinasi mencapai 46.000 orang sesuai daftar yang dilaporkan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bantul meluncurkan kendaraan operasional relawan Kalurahan Guwosari Pajangan ditandai dengan pemotongan pita dan penyiraman air bunga setaman.

Terpisah, Sekda Bantul Drs H Jamharis, juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di Balai Kalurahan Bantul. Program vaksinasi di Kalurahan Bantul selain untuk relawan FPRB juga untuk para guru. **(Jdm)-d**

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

Penelitian Dampak Covid-19 bagi Dunia Pendidikan

H Suryana AMDKes
Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Golkar

KR-Saifullah Nur Ichwan

H Suryana AMdKes

SLEMAN (KR) - Sudah setahun lebih pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi dilakukan secara online atau daring. Tentunya ini akan membawa dampak bagi siswa maupun dunia pendidikan itu sendiri. Untuk itu pemerintah perlu melakukan penelitian sosial terhadap dampak Covid-19 bagi dunia pendidikan.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi Golkar H Suryana AMdKes mengatakan, pembelajaran secara jarak jauh atau daring ini memang tidak bisa maksimal ketika dibandingkan dengan luring atau tatap muka. Namun hal itu memang harus dilakukan karena adanya pandemi Covid-19.

"Demi kesehatan dan keamanan kita semua, pembelajaran secara jarak jauh harus ditempuh. Tujuannya agar para siswa tetap bisa mendapatkan mata pelajaran dari guru," kata Suryana, Senin (29/3).

Suryana memprediksikan, dalam pembelajaran secara daring ini akan terjadi kesenjangan dalam memahami materi pendidikan. Mengingat para siswa ini dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, kebanyakan mengandalkan dari internet. "Belum lagi bagi anak-anak SD, mayoritas yang mengerjakan tugas justru orangtuanya. Hal inilah yang dimaksud kesenjangan memahami materi pendidikan antara sebelum pandemi dengan saat pandemi," tuturnya.

Untuk itu, anggota Komisi D DPRD Sleman ini menyarankan adanya penelitian sosial dampak Covid-19 bagi dunia pendidikan. Dari hasil penelitian itu, diharapkan nantinya akan ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan.

"Penelitian itu di antaranya perkembangan anak saat pandemi, tingkat kecerdasan anak sebelum pandemi dengan sekarang dan lainnya. Dari situ kita tahu, langkah apa yang harus diambil pemerintah agar mutu pendidikan tetap terjaga. Kalau tidak, ya nanti akan kesenjangan antara generasi sebelum pandemi dengan pascapandemi," terangnya.

Di samping itu, pihaknya juga sepakat jika pembelajaran akan dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Kebanyakan anak-anak sudah bosan belajar dari rumah sehingga merindukan untuk sekolah. "Jadi bukan hanya anak saja, tapi kebanyakan orangtua juga menginginkan segera digelar pembelajaran tatap muka. Untuk itu, pembelajaran tatap muka memang sudah sepatutnya digelar," paparnya.

Namun dalam pembelajaran tatap muka, penerapan protokol kesehatan harus ketat, termasuk sarana prasananya. Semua yang terlibat di sekolah perlu dilakukan simulasi penerapan protokol kesehatan. Kemudian kapasitas anak juga dibatasi agar tidak terjadi kerumunan, misalnya satu kelas dapat dibuat 2-3 kelompok.

"Ketika pembelajaran selesai, anak-anak harus segera pulang supaya tidak kumpul-kumpul. Setiap seminggu sekali dievaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu. Sehingga pembelajaran tatap muka ini aman, lancar dan tidak menimbulkan klaster baru," sarannya. **(Sni)-d**

PENYERAHAN SPPT PBB SIMBOLIS

Antusias Warga Dlingo Bayar Pajak Tertinggi

KR-Rahajeng Pramesi

Pembayaran PBB secara simbolis dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala BKAD Bantul melalui mobile banking BPD DIY.

BANTUL (KR) - Pemkab Bantul melakukan penyerahan SPPT PBB secara simbolis. Selain itu sebagai bentuk penghargaan kepada Wajib Pajak (WP) yang taat dilakukan pemberian penghargaan kepada WP Panutan PBB P2 Tahun 2021. Sementara itu dari sekian banyak WP, Kecamatan Dlingo mendapatkan penghargaan karena tingkat animo pembayaran pajak bagi warga Dlingo paling tinggi.

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, di Gedung Mandala Sabha Lantai III, Senin (29/3), mengapresiasi warga Dlingo yang tingkat animo masyarakatnya tertinggi dalam pembayaran pajak. "Harapannya pembayaran pajak jangan menjadi sesuatu hal yang wajib, tapi sebuah kebutuhan untuk mewujudkan Bantul Projotamansari Sejahtera Agamis. Sehingga bayar pajak menjadi sebuah kebutuhan," tegas Wabup.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul, Drs Trisna Manurung MSi, menyampaikan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi bahwa pemilik SPPT PBB P-2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) tahun 2021 telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dan berkontribusi dalam pengelolaan PBB P-2 sesuai dengan kompetensi dan kedudukannya.

"Pembayaran pajak tepat waktu sangat bermanfaat untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan langsung bagi pembangunan Bantul," tegasnya.

BKAD Bantul, imbuhnya telah mencetak SPPT PBB P2 2021 dan selesai mendistribusikan kepada 75 desa se-Kabupaten Bantul pada Januari hingga Februari 2021 dengan pokok ketetapan PBB P-2 2021 sebesar Rp 71.088.986.-626.00 dengan jumlah SPPT PBB 652.696 lembar. Adapun jatuh tempo PBB P-2 di Kabupaten Bantul dibagi bertahap antar kelurahan supaya mengurangi penumpukan pembayaran.

Pembayaran PBB secara simbolis dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala BKAD Bantul melalui mobile banking BPD DIY. Adapun penyerahan simbolis dan pemberian piagam penghargaan kepada wajib pajak panutan. Secara simbolis diberikan kepada Lurah Ngestiharjo, Lurah Bangunharjo dan Lurah Banguntapan. Adapun pemberian piagam penghargaan kepada WP Panutan pembayaran PBB P-2 2021 sebanyak 40 WP. **(Aje)-d**

KR-Rahajeng Pramesi

Bupati Bantul menyerahkan piagam penghargaan kepada Wajib Pajak Panutan.